

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu dari dua subsistem dalam sistem pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, SKPD diberikan kuasa untuk menggunakan alokasi dana (anggaran) dan barang atau aset yang dibutuhkan. Pelimpahan kuasa tersebut tidak hanya berisi hak untuk menggunakan dana, namun juga berimplikasi pada sisi kewajiban, yaitu SKPD wajib mewujudkan target kinerja dari usulan kegiatan di anggarannya. Dana publik yang menjadi hak SKPD tidak dikeluarkan tanpa suatu tujuan, namun ada target kinerja yang harus diwujudkan. Terkait dengan informasi keuangan, SKPD harus selalu mengetahui berapa dana publik yang telah masuk, berapa dana yang telah digunakan dan berapa dana yang belum digunakan. Bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan.

Dengan demikian, SKPD disebut sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*). SKPD sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) harus melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hal yang bagus dari badan atau instansi pemerintah. Menurut Herman *et al* (2014) publik dapat mengetahui dari mana sumber

uang instansi dan kemana uang itu dibelanjakan dan berapa sisanya (tujuan dari laporan arus kas) karena uang instansi tersebut adalah uang rakyat. Ide kedua adalah dengan diketahui sumber uang dan kemana dibelanjakan, maka akan diketahui bahwa uang yang dibelanjakan tepat sasaran atau tidak. Ide ketiga adalah publik atau rakyat dapat menilai (dari laporan keuangan) seberapa kayanya negara ini, dan seberapa besar utang pemerintah yang ujung-ujungnya rakyat jugalah yang menanggung utang itu. Ide keempat adalah uang negara harus dibelanjakan sesuai UU dan peraturan yang berlaku dan rakyat akan mengetahui dari Laporan Realisasi Anggaran. Ide kelima adalah rakyat (terutama para pakar setelah menganalisa laporan keuangan) akan mengetahui dari laporan keuangan pemerintah bahwa negara atau instansi pemerintah (secara keuangan) dalam keadaan bahaya. Dari fungsi atau ide-ide tersebut ditekankan bahwa laporan keuangan SKPD haruslah laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum, dan juga telah diatur dan didukung oleh perundang-undangan dan peraturan pemerintah, seperti dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan, badan atau instansi pemerintah daerah diharapkan telah melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, undang-undang dan peraturan yang berlaku., sehingga dapat dihasilkannya laporan keuangan yang andal, reliabel, akuntabel dan transparan.

Namun dalam praktiknya, proses penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah khususnya di Sumatera Barat masih menghadapi permasalahan dalam penerapan standar dan undang-undang. Herman *et al* (2014) pada *research report* yang berjudul “Mengungkap Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada SKPD di Provinsi Sumatera Barat” berhipotesis bahwa proses penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah belum benar atau proses yang diikuti oleh petugas akuntansi tidak sesuai dengan teori dan proses yang diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadi penyimpangan sebesar -54,23% dalam praktek akuntansi yang dijalanka SKPD dengan teori atau dasar hukum yang berlaku. Menurut website Antaranews (18 september 2015) ketua BPK Dr. Harry Azhar Aziz menilai pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) belum sebaik entitas pengelolaan laporan keuangan Kementerian Negara dan Lembaga.

Berdasarkan jurnal dan berita yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa praktik akuntansi pemerintah daerah masih mengalami kendala ataupun masalah dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan undang undang

yang berlaku. Hal tersebut dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kesalahan dalam proses terjadi, maka informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi salah saji yang mengakibatkan informasi tersebut tidak dapat dipercaya dan laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, ataupun keputusan yang telah diambil dari laporan tersebut menjadi tidak efektif. Selain itu hal ini juga mengakibatkan terjadinya kesalahan pada laporan keuangan konsolidasian baik itu kota, provinsi ataupun Indonesia secara keseluruhan, dan juga berdampak pada tujuan pemerintah dalam hal pencapaian *Good Governance*.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai siklus akuntansi pada SKPD di Sumatera Barat, apakah proses penyusunan laporan keuangan SKPD di Sumatera Barat telah sesuai dengan teori siklus akuntansi dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **ANALISIS PRAKTIK SIKLUS AKUNTANSI PADA PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS PADA SKPD A DI KOTA PADANG)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan tersebut, dapat disusun rumusan permasalahan atau pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses sesungguhnya yang terjadi dalam praktek penyusunan laporan keuangan SKPD ?

2. Apakah laporan keuangan SKPD telah disusun sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku?
3. Apakah proses akuntansi yang dijalankan oleh petugas atau pegawai SKPD sudah sesuai dengan dengan *true accounting process*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktek siklus akuntansi sesungguhnya yang terjadi dalam praktik penyusunan laporan keuangan SKPD.
2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan SKPD telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Untuk mengetahui apakah proses akuntansi yang dijalankan oleh petugas atau pegawai SKPD sudah sesuai dengan dengan proses akuntansi yang benar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai proses siklus akuntansi pada proses penyusunan laporan keuangan Instansi pemerintah daerah.
2. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang bersifat sejenis.

3. Bagi pemerintah daerah dan SKPD terkait, sebagai pertimbangan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik siklus akuntansi pada instansi pemerintah di Sumatera Barat, dimana dari 39 badan atau dinas provinsi Sumatera Barat (sumbarprov.go.id) akan digunakan satu sampel untuk penelitian yaitu SKPD A Kota Padang. Pemilihan sampel tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya yang membuat peneliti merasa tidak mungkin untuk membahas semua instansi pemerintah yang ada di Sumatera Barat, sehingga pemilihan SKPD A sebagai sampel dirasa cukup untuk membahas atau menggambarkan praktik siklus akuntansi yang terjadi di Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada proses penyusunan laporan keuangan SKPD A Kota Padang untuk tahun anggaran 2015.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam skripsi ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB II HASIL PENELITIAN

Pada hasil penelitian ini dijelaskan teori-teori dan konsep yang mendasari penyusunan skripsi, yang kemudian dikaitkan dengan hasil dari penelitian.

BAB III PENUTUP

Pada bagian penutup dijelaskan tentang kesimpulan, saran dan implikasi dari penelitian ini.

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya oleh Herman *et al* (2014) dengan judul “Mengungkap Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Studi Empiris pada SKPD di Provinsi Sumatra barat” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan yang cukup signifikan dalam praktek akuntansi yang dijalankan pada SKPD (Instansi di Provinsi Sumatra Barat) kalau dibandingkan teori/dasar hukum yang berlaku.

Endah (2009) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan)”, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dinas Tata Kota Tata Bangunan Kota Medan telah menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007, namun SKPD membuat laporan arus kas (padahal seharusnya tidak perlu)

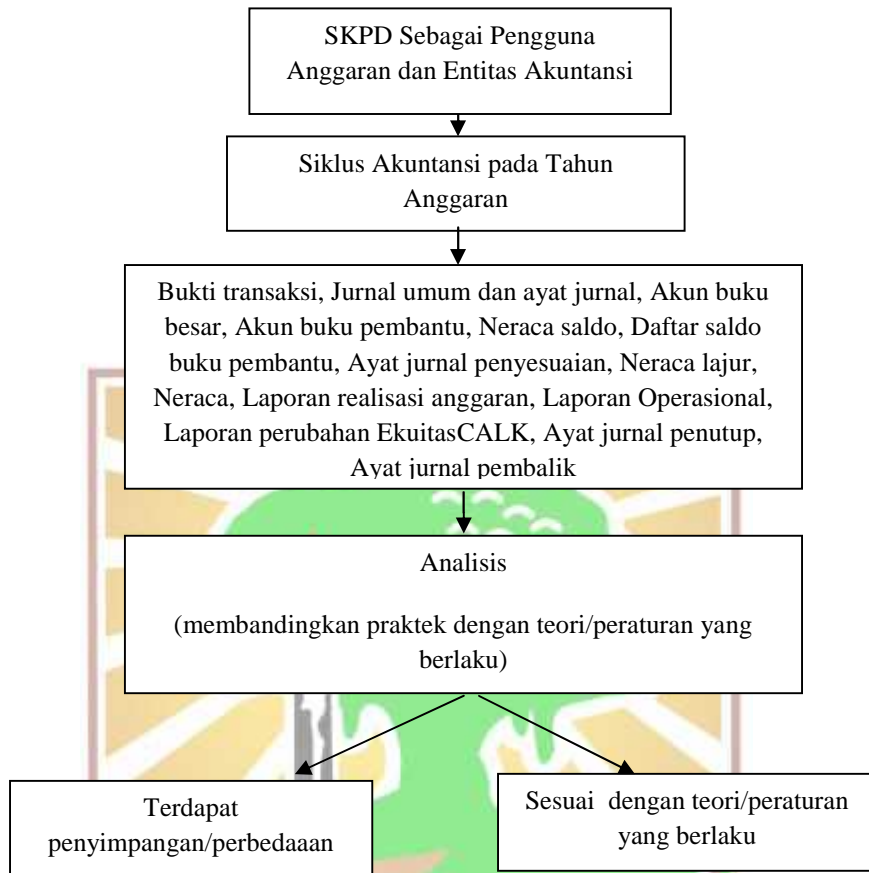
Rahmi (2015) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus pada SKPD X di Kota Pariaman)” dengan menginterpretasikan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan teori/dasar hukum yang berlaku sebesar 46,66%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa proses akuntansi yang diterapkan serta laporan keuangan yang disajikan belum sesuai sepenuhnya dengan standar akuntansi pemerintah serta undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri serta teori-teori yang berlaku lainnya terkait dengan proses akuntansi pada SKPD.

1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukkan dalam bentuk bagan alur di bawah ini.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dikatakan deskriptif karena berfokus pada upaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan proses penyusunan laporan keuangan yang datanya diperoleh dari objek penelitian dan literatur dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk

mengetahui keadaan dan permasalahan yang sebenarnya dari objek penelitian untuk dicari penyelesaiannya.

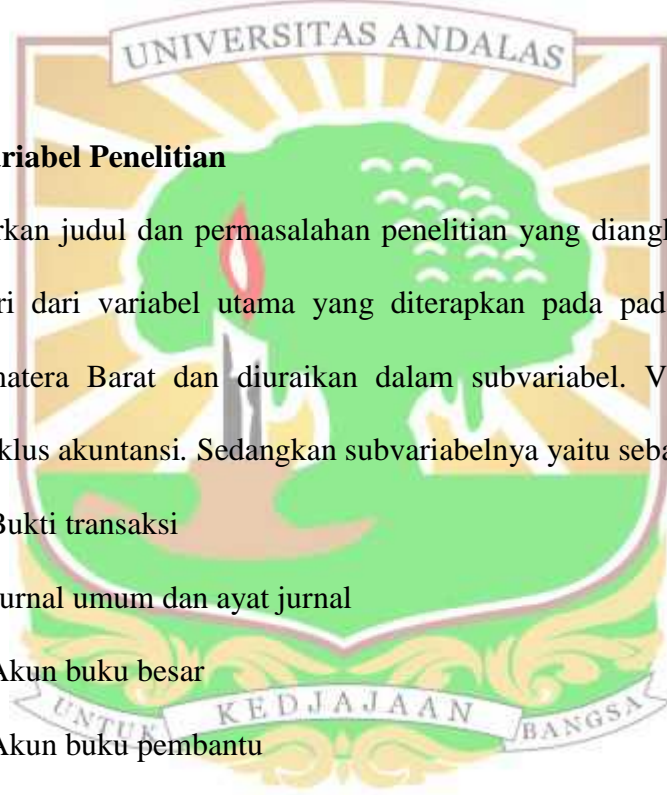
1.9.2 Objek Penelitian

Menurut Arikunto (2006) dalam wahyuni (2015) objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah proses penyusunan laporan keuangan pada SKPD A Kota Padang.

1.9.3 Variabel Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan penelitian yang diangkat maka variabel penelitian terdiri dari variabel utama yang diterapkan pada pada SKPD A Kota Padang di Sumatera Barat dan diuraikan dalam subvariabel. Variabel utamanya adalah proses siklus akuntansi. Sedangkan subvariabelnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bukti transaksi
- b. Jurnal umum dan ayat jurnal
- c. Akun buku besar
- d. Akun buku pembantu
- e. Neraca saldo
- f. Daftar saldo buku pembantu
- g. Ayat jurnal penyesuaian
- h. Neraca lajur
- i. Neraca
- j. Laporan realisasi anggaran



- k. Laporan Operasional
- l. Laporan Perubahan Ekuitas
- m. CALK
- n. Ayat jurnal penutup
- o. Ayat jurnal pembalik

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari observasi objek penelitian di lapangan yaitu data yang diambil dari SKPD A Kota Padang berupa dokumen - dokumen yang diperlukan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Riset Lapangan (*field research*)

Yaitu dengan mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke dinas yang bersangkutan dan kemudian melakukan pengumpulan sejumlah data yang terekam atau tercatat yang memperlihatkan karakteristik - karakteristik sebagian atau keseluruhan dari suatu sistem. Sehingga dapat dikatakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghimpun data seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Riset Pustaka (*library research*)

Yaitu dengan mempelajari undang-undang, peraturan, buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

1.9.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam analisis dan penarikan kesimpulan final mengikuti cara yang dilakukan oleh peneliti terdahulu herman, ilmainir dan zainuddin (2014) yang melakukan analisis dan penarikan kesimpulan dalam beberapa tahap:

Berdasarkan penelitian Herman *et al* (2014) kesimpulan akhir ditarik melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah dengan menetapkan kriteria (standar), dasar teori minimal oleh referensi yang sah menurut UU dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, seperti UU, PP, Peraturan Menteri. Kalau tidak menemukan dasar hukum yang kuat dalam UU dan peraturan yang berlaku, maka akan merujuk pada teori minimal yang ditetapkan oleh pakar akuntansi melalui buku-buku yang diterbitkan. Kriteria, standar atau teori minimal memiliki nilai bobot 100. Dan kemudian setiap variable yang dianalisis ditetapkan bobotnya (Pemberian nilai ini mungkin subjektif atau objektif) kemudian setiap persentase bobot akan dijumlahkan bersamaan dengan bobot teori, kriteria, atau konsep dasar. Misalnya akumulatif bobot teori adalah 11.000 sementara bobot dari analisis praktek adalah 11.200, maka net variance adalah 200. Kesimpulan finalnya adalah 11.200 dikurangi dengan 11.000 = 200. Interpretasi atas kesimpulan final adalah proses akuntansi yang

ditetapkan oleh SKPD yang diteliti lebih baik sebesar 200 poin dari teori dasar, kriteria atau standar minimal.

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa bobot atau skor yang diberikan bersifat subjektif maka peneliti dalam memberikan bobot atau skor pada penelitian terlebih dahulu berdiskusi dengan pembimbing sehingga skor atau bobot yang diberikan adalah skor atau bobot yang tidak hanya berasal dari peneliti semata tetapi juga berasal dari pertimbangan terhadap pendapat dan masukan dari dosen pembimbing.

Indikator penelitian yang peneliti gunakan adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Variabel telah dicatat atau disajikan | 40 |
| 2. Mengikuti format dari regulasi-regulasi yang telah ditentukan | 20 |
| 3. Sesuai dengan ketentuan regulasi dan perundang-undangan | 20 |
| 4. Sesuai dengan teori siklus akuntansi | <u>20</u> |
| | 100 |

Apabila subvariabel yang diteliti telah disajikan oleh objek penelitian maka nilai yang diberikan adalah 40, lalu apabila variabel tersebut memenuhi kriteria/indikator lainnya (mengikuti format, sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan sesuai dengan teori) maka akan diberikan poin sebesar 20 untuk setiap indikator.